



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/156/427.12/2022

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/583/427.12/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/126/427.12/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/583/427.12/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu perlu dicabut;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan pengurusan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menunjuk kembali Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Bendahara sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagai berikut :

a. Bendahara Penerimaan :

- 1) menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
- 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- 3) melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan disertai register penutupan kas.

b. Bendahara Pengeluaran :

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- 2) menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang;
- 3) melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 8) melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan disertai register penutupan kas.
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu :
- 1) menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan Tambahan Uang dari Bendahara Umum Daerah;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/583/427.12/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/126/427.12/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/583/427.12/2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lumajang;
 2. Sdr. Inspektur Daerah;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah;
 4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah;
 5. Sdr. Kepala Unit Kerja.
-

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR:188.45/156/427.12/2022
 TENTANG BENDAHARA
 PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

1. NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

A. SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	IKA SEPTI DAMAYANTI (III/a) NIP. 19780907 201001 2 002
2.	Sekretariat DPRD	MOCH. IMAM SATRIA (II/c) NIP. 19770514 200801 1 016
3.	Inspektorat Daerah	NURITA (II/d) NIP. 19750727 200801 2 013

B. BADAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	TRI MARIYONO, S.AP (II/a) NIP. 19730307 200701 1 020
2.	Badan Kepegawaian Daerah	-	MUKLISIN (II/c) NIP. 19820501 201001 1 002
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	IWAN SURYANTO (II/b) NIP. 19790411 201406 1 005
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	AULIA CANDRA DINI, A.Md (III/a) NIP. 19820803 201101 2 012	FARIDATUL MUTMAINAH (III/a) NIP. 19770427 201001 2 001
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	EKO DIAN WIJAYANTO (II/b) NIP. 19770609 201406 1 001
6.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	SITI AISYAH, S.AP (III/d) NIP. 19660108 199103 2 007	ADIETYA AGUNG NOEGROHO (II/c) NIP. 19810115 201001 1 001

C. DINAS

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	SUCIPTO (II/d) NIP. 19640314 200701 1 015
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	FRESTY LIA OKTYAWANTY (II/d) NIP. 19821022 200701 2 003
3.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	NOVITA LISA AMALIYAH (II/d) NIP. 19751120 200604 2 030	PRIYO UTOMO (II/b) NIP. 19820923 201406 1 001
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SUPRIYANTO (II/b) NIP. 19760702 201406 1 001	BUMIN (II/d) NIP. 19690506 200906 1 002
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	TATOK SUGIANTO (I/d) NIP. 19850714 201406 1 001	DORA YULIANTI FASA (II/b) NIP. 19860513 201406 2 002

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
6.	Dinas Perikanan	DINI RAHAYUNING MARDIKA, S.Pi (III/a) NIP. 19940823 201903 2 010	FRANSISKA DWI SUSANTI, S.Pi (III/a) NIP. 19850104 201903 2 007
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	ACHMAD RONI MUJIATMIKO (II/d) NIP. 19800818 200801 1 013	RIMA NUREMILIA SALAMAH, SE (III/a) NIP. 19780208 200801 2 018
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	SUPRIYANTI (II/b) NIP. 19810726 201406 2 004
9.	Dinas Tenaga Kerja	-	VIVIN YULIANTO (III/a) NIP. 19850702 200903 1 002
10.	Dinas Perhubungan	SUYITNO (II/a) NIP. 19680405 200801 1 020	SITI AROFAH (II/d) NIP. 19740920 200701 2 008
11.	Dinas Lingkungan Hidup	MUSTOFA ARIFIN, SE (III/a) NIP. 19791225 200801 1 010	SLAMET HARIYANTO (II/d) NIP. 19730225 200604 1 006
12.	Dinas Pariwisata	BUDI SETIAWAN (I/d) NIP. 19770713 200901 1 002	MOCH. YANI (I/d) NIP. 19831106 200801 1 005
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	MALIKHA RUSTYA W, A.Md (III/b) NIP. 19810624 201001 2 016
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	ANANG NUR HANANY, S.Sos (III/a) NIP. 19781211 201001 1 012
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	SULISTIYONO (II/d) NIP. 19750819 200901 1 002
16.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	SYAIFUL ANAM, S.AP (III/a) NIP. 19801113 200901 1 002	DEVI ROSALYNA (II/d) NIP. 19770416 200801 2 021
17.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	DINA ARIYANTI (III/a) NIP. 19810409 201001 2 003	ASRI NOER AINI (II/a) NIP. 19850730 201406 2 004
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	SUGENG GUNAWAN (II/a) NIP. 19810212 201406 1 003
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	ST. LUTFIYAH, S.AP (III/c) NIP. 19761102 199803 2 001

D. KECAMATAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1.	Kecamatan Lumajang	ISWARINI (II/b) NIP. 19720905 201406 2 001
2.	Kecamatan Sukodono	TITIN AGUSTINA, A.Md (III/b) NIP. 19830712 201101 2 012
3.	Kecamatan Senduro	AMINUDIN, S.Sos (III/a) NIP. 19670710 200701 1 047
4.	Kecamatan Gucialit	SADI HARIYANTO (II/d) NIP. 19690517 200906 1 004
5.	Kecamatan Klakah	NOVIE LISTIANDARI, SE (II/b) NIP. 19791120 201406 2 002
6.	Kecamatan Kedungjajang	DHIAN PUSPITASARI (II/d) NIP. 19741004 200604 2 022
7.	Kecamatan Ranuyoso	YUDO BASUKI (II/d) NIP. 19690625 200701 1 023
8.	Kecamatan Randuagung	EKO MARSUDI, S.Pd (III/d) NIP. 19670609 199803 1 009
9.	Kecamatan Pasirian	SUSIANI (II/b) NIP. 19830825 201406 2 003
10.	Kecamatan Tempeh	IMAM SAFII (II/c) NIP. 19740929 201001 1 004
11.	Kecamatan Candipuro	SUTRISNO (III/a) NIP. 19690705 200701 1 065
12.	Kecamatan Pronojiwo	RUKMINI (II/d) NIP. 19701004 201001 2 003
13.	Kecamatan Tempursari	I WAYAN AGASTYA PRATAMA, S.STP (III/a) NIP. 19961218 201808 1 001

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
14.	Kecamatan Yosowilangun	REDI NURCAHYONO (II/d) NIP. 19780426 200801 1 012
15.	Kecamatan Jatiroto	AGUSTIN DIANA FITRI, A.Md (II/d) NIP. 19790827 201406 2 005
16.	Kecamatan Rowokangkung	SAJIONO, S.Pd (III/a) NIP. 19680202 199703 1 008
17.	Kecamatan Kunir	MOCHAMAD SHOLEH (II/c) NIP. 19790207 201001 1 003
18.	Kecamatan Tekung	AJENG KURNIASARI, A.Md (III/b) NIP. 19851106 201001 2 038
19.	Kecamatan Padang	PURI LIAPERMATA GINAYU H, SE (III/b) NIP. 19860710 200903 2 005
20.	Kecamatan Pasrujambe	ASRI MAISAROH, SE (II/b) NIP. 19791212 201406 2 004
21.	Kecamatan Sumpusuko	SUPRIYADI (II/d) NIP. 19680428 200701 1 017

2. NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
A. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3
1.	Bagian Tata Pemerintahan	ACI DHAMAR KARTIKA (II/d) NIP. 19860805 200604 2 004
2.	Bagian Hukum	NASRUL SUHUF SALEHAN, SH (III/a) NIP. 19910206 201903 1 011
3.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RODIYATILISTIYORINI (III/a) NIP. 19821202 201001 2 002
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	VIVIN NAHARANI, S.AP (III/a) NIP. 19830430 201001 2 003
5.	Bagian Umum	M. MARIA SUDARTI (III/b) NIP. 19641018 198303 2 002
6.	Bagian Organisasi	EFFENDY AGUNG WICAKSONO (II/b) NIP. 19800529 201406 1 001
7.	Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	BAKTI HARI PURWANTO (II/c) NIP. 19820129 201001 1 002
8.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	EKO NUR KURNIANTO (II/b) NIP. 19850118 201406 1 002

B. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3
1.	Unit Terminal dan Ijin Trayek	MUHAMAD ABDUL BASIR (II/b) NIP. 19660815 200901 1 001
2.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	TITIN WINDIASARI (III/a) NIP. 19790804 200801 2 019
3.	Unit Perparkiran	YUYUT SUGIYANTO (II/b) NIP. 19770929 200901 1 005

C. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3
1.	Sekretariat	LIA EKAWATI (II/b) NIP. 19800722 201406 2 006
2.	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	SUGENG MULYO HARTONO (II/b) NIP. 19720802 200701 1 021

3.	Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat	MUSTHOFA NAJIB (II/c) NIP. 19640717 200012 1 001
4.	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	ILLAH NUR WULANDARI (II/b) NIP. 19740714 201406 2 001
5.	Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan	ABDUL AZIZ (II/d) NIP. 19681009 200701 1 020

D. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3
1.	Pasar Baru Lumajang	SUPI'I (II/c) NIP. 19710402 199403 1 004
2.	Pasar Plaza Lumajang	DARSUN (I/d) NIP. 19730630 200701 1 015
3.	Pasar Klojen	AGUNG PRIBADI (II/d) NIP. 19740901 200801 1 009
4.	Pasar Higienis	ADY YULIONO (II/d) NIP. 19691120 200701 1 007
5.	Pasar Senggol	MOH. SATUWIANTO (I/c) NIP. 19650613 200901 1 003
6.	Pasar Serangin	MOKHAMAD ROKHIM (II/d) NIP. 19680112 200701 1 037
7.	Pasar Agropolitan Seroja Senduro	BUMIN AKHMADI (II/d) NIP. 19670831 200801 1 003
8.	Pasar Senduro	NANANG QOSIM (I/d) NIP. 19810221 200901 1 006
9.	Pasar Sukodono	SUGIYANTO (II/a) NIP. 19680828 200701 1 032
10.	Pasar Dawuhan	MUHAMAD ZAINUL ANWAR (I/d) NIP. 19671221 200801 1 004
11.	Pasar Randuagung	TOTOK HANDRIONO (II/d) NIP. 19700829 200801 1 007
12.	Pasar Klakah	MARKUAT (II/d) NIP. 19690325 200701 1 008
13.	Pasar Ranuyoso	MAT JURianto, S.AP (III/a) NIP. 19690415 200701 1 032
14.	Pasar Yosowilangun	SAMSUL MU'ARIF (II/d) NIP. 19700211 199403 1 008
15.	Pasar Nogosari	SUGITO (II/d) NIP. 19660115 200701 1 019
16.	Pasar Kunir	ZAINUL HALIM (II/d) NIP. 19690614 199403 1 004
17.	Pasar Tempeh	WAGITO (II/b) NIP. 19691201 200701 1 020
18.	Pasar Pasirian	NURUL WAHIDAH (II/b) NIP. 19761118 200801 2 014
19.	Pasar Candipuro	ROMI EKO LESMONO (I/d) NIP. 19780612 200901 1 006
20.	Pasar Pronojiwo	DIDIK WAHYUDI (I/d) NIP. 19720913 200801 1 013
21.	Bidang Metrologi	ANINDITA WIJAYANTI, Amd (II/c) NIP. 19961112 201903 2 005

E. BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3
1.	Wilayah kerja pemungutan pajak di Yosowilangun	MUHAMMAD JULIANTO (II/c) NIP. 19690715 200906 1 002
2.	Wilayah kerja pemungutan pajak di Lumajang	IWAN YANUAR PRIHATMANTO (II/d) NIP. 19720116 200701 1 007

3.	Wilayah kerja pemungutan pajak di Klakah	SAMSUL HADI (II/d) NIP. 19691211 200601 1 007
4.	Wilayah kerja pemungutan pajak di Pasirian	TOSLAH (II/b) NIP. 19820513 201406 1 002

F. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
1.	RSUD Dr. Haryoto	-	BAGUS HADIBOWO (II/d) NIP. 19821010 200901 1 006
2.	RSUD Pasirian	-	SITI ZULAIKHAH, A.Md.Keb. (III/a) NIP. 19750705 200604 2 043
3.	Puskesmas Tempursari	-	RATNAWATI, A.Md.Kep (II/c) NIP. 19890703 202012 2 03
4.	Puskesmas Pronojiwo	-	HIDAYAT DWI NUGROHO, A.Md, KL (III/a) NIP. 19770710 201101 1 004
5.	Puskesmas Candipuro	-	NIKMATUL KHOIROH, M.Md.Kep (III/c) NIP. 19820317 200801 2 019
6.	Puskesmas Penanggal	-	EKA YUDI NURRAKHMAWATI, A.Md.Gz. (II/c) NIP. 19910108 201903 2 009
7.	Puskesmas Pasirian	-	KURNIA ARUM NDANI, A.Md.KL (II/c) NIP. 19950731 201903 2 015
8.	Puskesmas Bades	-	IIN LIASASI (III/a) NIP. 19770421 200701 2 032
9.	Puskesmas Tempeh	-	NARDA DESTISAPUTRI KINASIH, A.Md.Farm. (III/b) 19861231 201001 2 038
10.	Puskesmas Gesang	-	SUS SETYANINGSIH (III/d) NIP. 19701016 199103 2 006
11.	Puskesmas Rogotrunan	-	LILA NOVIYANTI (II/c) NIP. 19831103 201704 2 002
12.	Puskesmas Labruk Kidul	-	ARI SUSANTI (III/b) NIP. 19810130 200604 2 017
13.	Puskesmas Tekung	-	HENIK SRI MARTYANINGSIH (III/b) NIP. 19820310 201001 2 031
14.	Puskesmas Kunir	-	NUR INDAH WAHYUNI, A.Md, Kep. (III/c) NIP. 19830510 200501 2 013
15.	Puskesmas Yosowilangun	-	YUSI SUHERMIN, S.Gz (III/d) NIP. 19711020 199503 2 005
16.	Puskesmas Sumbersari	-	SRIYAMI, S.ST (III/a) NIP. 19760331 200701 2 006
17.	Puskesmas Jatiroto	-	CHOTIJATUL MUNIFAH (III/c) NIP. 19740103 200012 2 002
18.	Puskesmas Randuagung	-	FEMMY DIANITA OCTORA, A.Md.Gz. (III/b) NIP. 19881023 201001 2 009
19.	Puskesmas Sukodono	-	IDA LESTARI (III/c) NIP. 19821020 200604 2 038
20.	Puskesmas Padang	-	R. SITI HASANAH A.Md. Farm (III/a) NIP. 19761110 200604 2 031

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
21.	Puskesmas Pasrujambe	-	GIYANTO, S.ST (III/d) NIP. 19780608 200501 1 013
22.	Puskesmas Senduro	-	FERI HANDAYANI, S.Kep. (III/c) NIP. 19820913 200801 2 017
23.	Puskesmas Gucialit	-	MARWADANI ASRI PRAMESWARI, A.Md.Gz (III/b) NIP. 19861013 201001 2 024
24.	Puskesmas Kedungjajang	-	ENY SETYOWATI (III/b) NIP. 19730725 200501 2 009
25.	Puskesmas Klakah	-	DWI SULISTIYO AGUSTIN, A.Md.Kep, (II/c) NIP. 19880805 201903 2 011
26.	Puskesmas Ranuyoso	-	ARI PUJIANINGTYAS (III/a) NIP. 19880328 201101 2 018
27.	Puskesmas Tunjung	-	FITRIA DEWI K, A.Md.KL. (III/b) NIP. 19890627 201101 2 011
28.	Instalasi Farmasi	-	DIAH YULI PANGESTI, S.Farm, Apt. (III/b) NIP. 19880824 201903 2 013
29.	Laboratorium Kesehatan	FARIDA KIRANA, A.Md (III/b) NIP. 19860408 201101 2 014	TITIK RAHAYUNINGTIAS, Amd.Kes. (III/a) NIP. 19750322 200604 2 027

G. KECAMATAN LUMAJANG

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3
1.	Kelurahan Citrodiwangsan	PRATIWI, AMd, Kep (III/a) NIP. 19880710 201101 2 016
2.	Kelurahan Ditotrunan	BUKARI (II/c) NIP. 19660315 199403 1 013
3.	Kelurahan Jogotrunan	YUNI KUSWANTI (II/b) NIP. 19661231 198602 2 008
4.	Kelurahan Jogoyudan	ASPARI, S.AP (III/a) NIP. 19670412 200701 1 043
5.	Kelurahan Tompokersan	SITI RUKHANI (III/b) NIP. 19660603 198903 2 008
6.	Kelurahan Rogotrunan	MOHAMAD ALI SAIFUN (I/d) NIP. 19680129 200901 1 002
7.	Kelurahan Kepuharjo	SUHERMANTO (II/d) NIP. 19710421 199403 1 005

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H.THORIQUL HAQ, M.ML.